



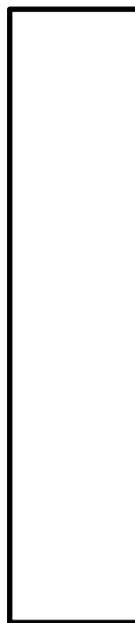
**PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO**

**NOMOR 12 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WONOKROMO**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



KALURAHAN : WONOKROMO

KAPANEWON : PLERET

KABUPATEN : BANTUL



## **LURAH WONOKROMO**

KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO  
NOMOR 12 TAHUN 2022

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WONOKROMO  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH WONOKROMO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, adalah rencana keuangan tahun anggaran 2023 Pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, serta ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25 Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
26. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 11);
28. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 7 Tahun

2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wonokromo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2022 Nomor 7);

30. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2022 Nomor 6);

31. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusa-waratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2022 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO  
dan  
LURAH WONOKROMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
WONOKROMO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan :    | 6.335.569.158 |
| a. Pendapatan Asli Kalurahan | 504.240.150   |
| b. Dana Desa                 | 1.795.043.000 |

|                          |  |                  |
|--------------------------|--|------------------|
| c.                       | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah         | 519.747.808      |
| d.                       | Alokasi Dana Desa                                    | 1.261.138.200    |
| e.                       | Bantuan Keuangan Propinsi                            | 1.250.000.000    |
| f.                       | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota            | 1.000.000.000    |
| g.                       | Pendapatan lain-lain                                 | 5.400.000        |
| 2. Belanja Kalurahan:    |  |                  |
| a.                       | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan        | 2.831.219.100,58 |
| b.                       | Bidang Pelaksanaan Pembangunan                       | 2.202.094.844,00 |
| c.                       | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                      | 583.628.000,00   |
| d.                       | Bidang Pemberdayaan Masyarakat                       | 634.439.000,00   |
| e.                       | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | 270.100.000,00   |
|                          | Jumlah Belanja                                       | 6.521.480.944,58 |
|                          | Surplus/ (Defisit)                                   | (185.911.786,58) |
| 3. Pembiayaan Kalurahan: |  |                  |
| a.                       | Penerimaan Pembiayaan                                | 265.911.786,58   |
| b.                       | Pengeluaran Pembiayaan                               | 80.000.000,00    |
|                          | Pembiayaan Netto                                     | 185.911.786,58   |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah Kalurahan guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Peraturan Kalurahan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan : di Wonokromo

Pada tanggal : 29 Desember 2022



Diundangkan : di Wonokromo

Pada tanggal : 29 Desember 2022

CARIK WONOKROMO,

  
**AKHMAD RIYANTA**

LEMBARAN KALURAHAN WONOKROMO TAHUN 2022 NOMOR 12  
NOREG PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
(59/ WONOKROMO/ 2022)

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA WONOKROMO  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WONOKROMO  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

| KODE REK  | URAIAN                                | ANGGARAN<br>( Rp )      | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1         | 2                                     | 3                       | 4          |
| <b>4.</b> | <b>PENDAPATAN</b>                     |                         |            |
| 4.1.      | Pendapatan Asli Desa                  | 504.240.150,00          |            |
| 4.2.      | Pendapatan Transfer                   | 5.825.929.008,00        |            |
| 4.3.      | Pendapatan Lain-lain                  | 5.400.000,00            |            |
|           | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>6.335.569.158,00</b> |            |
| <b>5.</b> | <b>BELANJA</b>                        |                         |            |
| 5.1.      | Belanja Pegawai                       | 1.429.215.110,00        |            |
| 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa               | 3.134.493.577,41        |            |
| 5.3.      | Belanja Modal                         | 1.687.672.257,17        |            |
| 5.4.      | Belanja Tidak Terduga                 | 270.100.000,00          |            |
|           | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>6.521.480.944,58</b> |            |
|           | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>(185.911.786,58)</b> |            |
| <b>6.</b> | <b>PEMBIAYAAN</b>                     |                         |            |
| 6.1.      | Penerimaan Pembiayaan                 | 265.911.786,58          |            |
| 6.1.1.    | SILPA Tahun Sebelumnya                | 265.911.786,58          |            |
| 6.2.      | Pengeluaran Pembiayaan                | 80.000.000,00           |            |
| 6.2.2.    | Penyertaan Modal Desa                 | 80.000.000,00           |            |
|           | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>               | <b>185.911.786,58</b>   |            |
|           | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>             |            |

KIPONS-00, 29 December 2022  
 LURAH  
 LURAH  
 WONOKROMO  
 AM.MACHRUS HANAFLS.Ag  
 KAPANEWON PLEKET

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WONOKROMO  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

| KODE REKENING |           | URAIAN   | ANGGARAN (Rp)                  | SUMBERDANA       |
|---------------|-----------|--|--------------------------------|------------------|
| 1             | 2         | 3  | 4                              | 5                |
|               | <b>4.</b> | <b>PENDAPATAN</b>  |                                |                  |
|               | 4.1.      | Pendapatan Asli Desa   | 504.240.150,00                 |                  |
|               | 4.2.      | Pendapatan Transfer  | 5.825.929.008,00               |                  |
|               | 4.3.      | Pendapatan Lain-lain   | 5.400.000,00                   |                  |
|               |           | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>   | <b>6.335.569.158,00</b>        |                  |
|               | <b>5.</b> | <b>BELANJA</b>   |                                |                  |
| <b>1</b>      |           | <b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>                              | <b><u>2.831.219.100,58</u></b> |                  |
| <b>1.1.</b>   |           | <b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b> | <b>1.959.573.720,58</b>        |                  |
| 1.1.01        |           | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                             | 60.930.096,00                  | ADD              |
| 1.1.01        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 60.930.096,00                  |                  |
| 1.1.02        |           | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                          | 743.573.592,00                 | ADD              |
| 1.1.02        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 743.573.592,00                 |                  |
| 1.1.03        |           | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                      | 25.504.356,00                  | PAD              |
| 1.1.03        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 25.504.356,00                  |                  |
| 1.1.04        |           | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)            | 278.704.950,58                 | ADD, DLL, PAD, F |
| 1.1.04        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 278.704.950,58                 |                  |
| 1.1.05        |           | Penyediaan Tunjangan BPD   | 111.000.000,00                 | ADD              |
| 1.1.05        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 111.000.000,00                 |                  |
| 1.1.06        |           | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 26.097.370,00                  | PAD              |
| 1.1.06        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 26.097.370,00                  |                  |
| 1.1.07        |           | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW  | 171.705.000,00                 | DDS, PBH         |
| 1.1.07        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 171.705.000,00                 |                  |
| 1.1.08        |           | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa               | 53.851.290,00                  | DDS              |
| 1.1.08        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 53.851.290,00                  |                  |
| 1.1.90        |           | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK                                    | 9.812.748,00                   | PAD              |
| 1.1.90        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 9.812.748,00                   |                  |
| 1.1.92        |           | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal           | 87.109.673,00                  | PBH              |
| 1.1.92        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 87.109.673,00                  |                  |
| 1.1.93        |           | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal         | 18.402.020,00                  | PAD              |
| 1.1.93        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 18.402.020,00                  |                  |

| KODE REKENING |      | URAIAN  | ANGGARAN (Rp)         | SUMBERDANA    |
|---------------|------|---|-----------------------|---------------|
| 1             | 2    | 3   | 4                     | 5             |
| 1.1.94        |      | Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh                                    | 44.550.625,00         | PAD           |
| 1.1.94        | 5.1. | Belanja Pegawai   | 44.550.625,00         |               |
| 1.1.96        |      | Tunjangan Masa Kerja  | 44.520.000,00         | ADD           |
| 1.1.96        | 5.1. | Belanja Pegawai   | 44.520.000,00         |               |
| 1.1.97        |      | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan  | 55.176.000,00         | ADD           |
| 1.1.97        | 5.1. | Belanja Pegawai   | 55.176.000,00         |               |
| 1.1.98        |      | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorir  | 228.636.000,00        | ADD           |
| 1.1.98        | 5.1. | Belanja Pegawai   | 228.636.000,00        |               |
| <b>1.2.</b>   |      | <b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>                                    | <b>176.130.686,00</b> |               |
| 1.2.01        |      | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan                                 | 73.815.125,00         | DLL, PAD, PBH |
| 1.2.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 21.630.875,00         |               |
| 1.2.01        | 5.3. | Belanja Modal   | 52.184.250,00         |               |
| 1.2.02        |      | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa   | 56.429.561,00         | PAD           |
| 1.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 56.429.561,00         |               |
| 1.2.03        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )                  | 45.886.000,00         | PAD           |
| 1.2.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 1.336.485,00          |               |
| 1.2.03        | 5.3. | Belanja Modal   | 44.549.515,00         |               |
| <b>1.3.</b>   |      | <b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b> | <b>80.025.000,00</b>  |               |
| 1.3.02        |      | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)                                 | 26.370.000,00         | DDS           |
| 1.3.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 26.370.000,00         |               |
| 1.3.04        |      | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil                     | 9.000.000,00          | DDS           |
| 1.3.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 9.000.000,00          |               |
| 1.3.05        |      | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif                               | 44.655.000,00         | DDS           |
| 1.3.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 44.655.000,00         |               |
| <b>1.4.</b>   |      | <b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>     | <b>441.842.800,00</b> |               |
| 1.4.01        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)                 | 17.826.600,00         | DDS           |
| 1.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 17.826.600,00         |               |
| 1.4.02        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)               | 50.049.600,00         | DDS           |
| 1.4.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 50.049.600,00         |               |
| 1.4.03        |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                              | 108.827.200,00        | DDS, PAD      |
| 1.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 108.827.200,00        |               |
| 1.4.04        |      | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)                   | 16.208.800,00         | PAD           |
| 1.4.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 16.208.800,00         |               |
| 1.4.05        |      | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa                            | 32.877.000,00         | PAD           |
| 1.4.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 32.877.000,00         |               |
| 1.4.06        |      | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)                 | 20.492.000,00         | PAD           |
| 1.4.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 20.492.000,00         |               |

| KODE REKENING |      | URAIAN   | ANGGARAN (Rp)                  | SUMBERDANA    |
|---------------|------|--|--------------------------------|---------------|
| 1             | 2    | 3  | 4                              | 5             |
| 1.4.07        |      | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat                | 7.093.200,00                   | PAD           |
| 1.4.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 7.093.200,00                   |               |
| 1.4.08        |      | Pengembangan Sistem Informasi Desa   | 123.546.400,00                 | DDS, PBP      |
| 1.4.08        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 123.546.400,00                 |               |
| 1.4.10        |      | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD           | 64.922.000,00                  | PAD           |
| 1.4.10        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 64.922.000,00                  |               |
| <b>1.5.</b>   |      | <b>Sub Bidang Pertanahan</b>   | <b>173.646.894,00</b>          |               |
| 1.5.06        |      | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  | 173.646.894,00                 | PBH           |
| 1.5.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 173.646.894,00                 |               |
| <b>2</b>      |      | <b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>                                      | <b><u>2.202.094.844,00</u></b> |               |
| <b>2.1.</b>   |      | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>   | <b>416.279.384,00</b>          |               |
| 2.1.01        |      | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 18.675.000,00                  | DDS           |
| 2.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 18.675.000,00                  |               |
| 2.1.02        |      | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)                                   | 165.046.400,00                 | BMP, DDS, PBK |
| 2.1.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 165.046.400,00                 |               |
| 2.1.03        |      | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat                                    | 40.220.550,00                  | BMP, DDS      |
| 2.1.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 40.220.550,00                  |               |
| 2.1.08        |      | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)                | 191.337.434,00                 | DDS, SDD      |
| 2.1.08        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 15.999.000,00                  |               |
| 2.1.08        | 5.3. | Belanja Modal  | 175.338.434,00                 |               |
| <b>2.2.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>  | <b>518.143.470,00</b>          |               |
| 2.2.02        |      | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)                   | 344.555.070,00                 | BMP, DDS, PBK |
| 2.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 342.055.070,00                 |               |
| 2.2.02        | 5.3. | Belanja Modal  | 2.500.000,00                   |               |
| 2.2.03        |      | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 68.713.400,00                  | BMP, DDS      |
| 2.2.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 68.713.400,00                  |               |
| 2.2.04        |      | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan   | 27.650.000,00                  | DDS           |
| 2.2.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 27.650.000,00                  |               |
| 2.2.91        |      | Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat  | 13.960.000,00                  | DDS           |
| 2.2.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 13.960.000,00                  |               |
| 2.2.94        |      | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting                                    | 14.465.000,00                  | BMP           |
| 2.2.94        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 14.465.000,00                  |               |
| 2.2.96        |      | Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, DII)                                 | 48.800.000,00                  | DDS           |
| 2.2.96        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 48.800.000,00                  |               |
| <b>2.3.</b>   |      | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                    | <b>755.871.000,00</b>          |               |
| 2.3.10        |      | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)                          | 240.000.000,00                 | PBK, PMK      |
| 2.3.10        | 5.3. | Belanja Modal  | 240.000.000,00                 |               |

| KODE REKENING |      | URAIAN   | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3  | 4                            | 5          |
| 2.3.12        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)             | 97.000.000,00                | DDS, PBK   |
| 2.3.12        | 5.3. | Belanja Modal  | 97.000.000,00                |            |
| 2.3.14        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll) | 150.000.000,00               | DDS, PBK   |
| 2.3.14        | 5.3. | Belanja Modal  | 150.000.000,00               |            |
| 2.3.15        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)         | 25.000.000,00                | DDS        |
| 2.3.15        | 5.3. | Belanja Modal  | 25.000.000,00                |            |
| 2.3.91        |      | Pembangunan / Pengembangan Kawasan Budaya Kalurahan                              | 243.871.000,00               | PBP        |
| 2.3.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 32.669.941,83                |            |
| 2.3.91        | 5.3. | Belanja Modal  | 211.181.058,17               |            |
| <b>2.4.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>  | <b>441.120.500,00</b>        |            |
| 2.4.01        |      | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN      | 250.000.000,00               | DDS, PBP   |
| 2.4.01        | 5.3. | Belanja Modal  | 250.000.000,00               |            |
| 2.4.15        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)            | 191.120.500,00               | BMP, PBK   |
| 2.4.15        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 171.120.500,00               |            |
| 2.4.15        | 5.3. | Belanja Modal  | 20.000.000,00                |            |
| <b>2.5.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>                                 | <b>31.410.150,00</b>         |            |
| 2.5.91        |      | Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah                                       | 31.410.150,00                | BMP, DDS   |
| 2.5.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 31.410.150,00                |            |
| <b>2.6.</b>   |      | <b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>                        | <b>40.270.340,00</b>         |            |
| 2.6.06        |      | Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan                        | 40.270.340,00                | PBK        |
| 2.6.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 270.340,00                   |            |
| 2.6.06        | 5.3. | Belanja Modal  | 40.000.000,00                |            |
| <b>3</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>                                    | <b><u>583.628.000,00</u></b> |            |
| <b>3.1.</b>   |      | <b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>      | <b>67.111.500,00</b>         |            |
| 3.1.03        |      | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa  | 28.110.000,00                | DDS        |
| 3.1.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 28.110.000,00                |            |
| 3.1.07        |      | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy. | 5.201.500,00                 | BMP        |
| 3.1.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 5.201.500,00                 |            |
| 3.1.92        |      | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)      | 14.800.000,00                | DDS        |
| 3.1.92        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 14.800.000,00                |            |
| 3.1.93        |      | Pencegahan dan Pengendalian Perubahan Iklim melalui Mitigasi dan Adaptasi        | 13.500.000,00                | DDS        |
| 3.1.93        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 13.500.000,00                |            |
| 3.1.94        |      | Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana                                | 5.500.000,00                 | DDS        |
| 3.1.94        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 5.500.000,00                 |            |
| <b>3.2.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>                                       | <b>419.922.500,00</b>        |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN  | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3   | 4                            | 5          |
| 3.2.02        |      | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)          | 9.850.000,00                 | DDS, PAD   |
| 3.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 9.850.000,00                 |            |
| 3.2.03        |      | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 94.567.500,00                | DDS        |
| 3.2.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 94.567.500,00                |            |
| 3.2.90        |      | Pembinaan Bidang Keagamaan  | 118.105.000,00               | DDS, PAD   |
| 3.2.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 118.105.000,00               |            |
| 3.2.91        |      | Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi   | 5.900.000,00                 | DDS        |
| 3.2.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 5.900.000,00                 |            |
| 3.2.93        |      | Pengembangan Desa Budaya  | 191.500.000,00               | PBP        |
| 3.2.93        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 191.500.000,00               |            |
| <b>3.3.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>   | <b>15.328.000,00</b>         |            |
| 3.3.02        |      | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa   | 15.328.000,00                | DDS        |
| 3.3.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 15.328.000,00                |            |
| <b>3.4.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>  | <b>81.266.000,00</b>         |            |
| 3.4.02        |      | Pembinaan LKMD/LPMLPMD  | 20.025.000,00                | DDS        |
| 3.4.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 20.025.000,00                |            |
| 3.4.03        |      | Pembinaan PKK   | 40.389.000,00                | DDS        |
| 3.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 36.589.000,00                |            |
| 3.4.03        | 5.3. | Belanja Modal   | 3.800.000,00                 |            |
| 3.4.04        |      | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan  | 20.852.000,00                | DDS        |
| 3.4.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 20.852.000,00                |            |
| 3.4.92        |      | Kegiatan Gotong Royong  | 0,00                         | DDS        |
| 3.4.92        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 0,00                         |            |
| <b>4</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>  | <b><u>634.439.000,00</u></b> |            |
| <b>4.2.</b>   |      | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>  | <b>554.764.000,00</b>        |            |
| 4.2.02        |      | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)                           | 471.379.000,00               | PBP        |
| 4.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 141.150.000,00               |            |
| 4.2.02        | 5.3. | Belanja Modal   | 330.229.000,00               |            |
| 4.2.04        |      | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana  | 14.000.000,00                | DDS        |
| 4.2.04        | 5.3. | Belanja Modal   | 14.000.000,00                |            |
| 4.2.05        |      | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan                   | 15.700.000,00                | PBP        |
| 4.2.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 15.700.000,00                |            |
| 4.2.90        |      | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan             | 63.685.000,00                | DDS        |
| 4.2.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 31.795.000,00                |            |
| 4.2.90        | 5.3. | Belanja Modal   | 31.890.000,00                |            |
| <b>4.4.</b>   |      | <b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>                      | <b>38.400.000,00</b>         |            |
| 4.4.02        |      | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak  | 25.350.000,00                | DDS        |
| 4.4.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 25.350.000,00                |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN   | ANGGARAN (Rp)           | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3  | 4                       | 5          |
| 4.4.03        |      | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)  | 13.050.000,00           | DDS        |
| 4.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 13.050.000,00           |            |
| 4.5.          |      | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)           | 31.275.000,00           |            |
| 4.5.01        |      | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM                                | 31.275.000,00           | DDS        |
| 4.5.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 31.275.000,00           |            |
| <b>5</b>      |      | <b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b> | <b>270.100.000,00</b>   |            |
| 5.1.          |      | Sub Bidang Penanggulangan Bencana                                    | 22.500.000,00           |            |
| 5.1.00        |      | Kegiatan Penanggulangan Bencana                                      | 22.500.000,00           | DDS        |
| 5.1.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga  | 22.500.000,00           |            |
| 5.2.          |      | Sub Bidang Keadaan Darurat   | 10.000.000,00           |            |
| 5.2.00        |      | Penanganan Keadaan Darurat   | 10.000.000,00           | DDS        |
| 5.2.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga  | 10.000.000,00           |            |
| 5.3.          |      | Sub Bidang Keadaan Mendesak  | 237.600.000,00          |            |
| 5.3.01        |      | Bantuan Langsung Tunai (BLT)   | 237.600.000,00          | DDS        |
| 5.3.01        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga  | 237.600.000,00          |            |
|               |      | <b>JUMLAH BELANJA</b>  | <b>6.521.480.944,58</b> |            |
|               |      | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>   | <b>(185.911.786,58)</b> |            |
| 6.            |      | <b>PEMBIAYAAN</b>  |                         |            |
| 6.1.          |      | Penerimaan Pembiayaan  | 285.911.786,58          |            |
| 6.2.          |      | Pengeluaran Pembiayaan   | 80.000.000,00           |            |
|               |      | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>  | <b>185.911.786,58</b>   |            |
|               |      | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                | <b>0,00</b>             |            |





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PLERET  
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦺꦫꦺꦠ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791

Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : [kcc.pleret@bantulkab.go.id](mailto:kcc.pleret@bantulkab.go.id) Website : [kcc-pleret.bantulkab.go.id](http://kcc-pleret.bantulkab.go.id)

Pleret, 29 Desember 2022

Nomor : 142/00429  
Lamp. : -  
Hal : Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang APBKal TA 2023 Kepada Yth. Lurah Wonokromo di - Wonokromo

Menanggapi Surat Saudara Lurah Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Nomor : 141/368, tanggal : 27 Desember 2022, perihal : Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal TA 2023.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Kalurahan Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa : *"Lurah mengajukan nomor register Peraturan Kalurahan kepada Panewu setelah hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan ditindaklanjuti bersama-sama Bamuskal dan/atau sebelum Rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan"*.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa **Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah : 59/WONOKROMO/2022.**

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos., MM.**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197201021998032009



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KAPANEWON PLERET**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦱꦺꦤ꧀ꦥꦼꦭꦺꦂ*

*Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791*

*Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385*

*Email : [kec-pleret@bantulkab.go.id](mailto:kec-pleret@bantulkab.go.id) Website : [kec-pleret.bantulkab.go.id](http://kec-pleret.bantulkab.go.id)*

**KEPUTUSAN PANEWU PLERET**  
**NOMOR 34 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN**  
**KALURAHAN WONOKROMO**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**PANEWU PLERET**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, harus dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang - undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Pleret tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN PANEWU PLERET TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU :** Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA :** Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 ( tujuh ) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.

- KETIGA : Lurah harus menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah diundangkan berdasarkan hasil evaluasi kepada Panewu paling lambat 7 ( tujuh ) hari kerja sejak tanggal pengundangan, dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan kalurahan.
- KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret  
Pada tanggal 20 Desember 2022



EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197201021998032009

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
  2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
  3. Ketua Bamuskal Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret;
- Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANEWU PLERET  
NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG  
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN KALURAHAN  
WONOKROMO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
WONOKROMO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah disusun sesuai kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
WONOKROMO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

A. Legal Drafting

Peraturan Kalurahan Wonokromo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah disusun sesuai Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.

B. Substansi Materi Raperkal

1. Dasar mengingat agar ditambahkan dasar hukum sebagai berikut :
  - Nomor 3 agar dituliskan sebagai berikut :
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
    - Nomor 3 lama diubah menjadi nomor 4
    - Nomor 4,5,6,7,8,9,10,11 lama dihapus
    - Nomor 5 dituliskan sebagai berikut :
      5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

- Nomor 6 dituliskan sebagai berikut:
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- Nomor 7 dituliskan sebagai berikut:
  7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
- Nomor 8 dituliskan sebagai berikut:
  8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
- Nomor 9 dituliskan sebagai berikut :
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
- Nomor 10 dituliskan sebagai berikut :
  10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- Nomor 11 dituliskan sebagai berikut :
  11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
- Nomor 12 dituliskan sebagai berikut
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- Nomor 13 dituliskan sebagai berikut :
  13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
- Nomor 14 dituliskan sebagai berikut :
  14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor .8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);

- Nomor 15 dituliskan sebagai berikut :
  15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
- Nomor 12,13,14 lama diubah menjadi nomor 16,17,18
- 2. Bab I Pasal 1 lama agar dihapus, pasal 2 diubah menjadi pasal 1.
- 3. Pasal 1 pada Pendapatan Kalurahan agar diuraikan rincian sumber dana dan anggarannya.
- 4. Pasal 1 pada Belanja Kalurahan agar dirinci per bidang beserta anggarannya.
- 5. Pasal 1 pada Pembiayaan Kalurahan dirinci penerimaan dan pengeluaran beserta anggarannya.
- 6. Penulisan di Pasal 2 sebagai berikut : Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
- 7. Pasal 3 lama agar dihapus dan pasal 4,5 diubah menjadi pasal 3,4.

C. Hasil Evaluasi :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Pagu Dana Desa Tahun 2023 Kalurahan Wonokromo sebesar Rp. 1.795.043.000,- maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa agar disesuaikan sebagai berikut :
  - a. Paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari Total Anggaran yang bersumber dari Dana Desa agar dialokasikan untuk program Pemulihan Ekonomi berupa Perlindungan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Ekstrim dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai minimal sebesar Rp. 179.504.300,- dan maksimal sebesar Rp. 448.760.750,-
  - b. Paling sedikit 20% dari Total Anggaran yang bersumber dari Dana Desa agar dialokasikan untuk Program Ketahanan Pangan dan Hewani minimal sebesar Rp. 359.008.600,-
  - c. Paling banyak 3% dari Total Anggaran yang bersumber dari Dana Desa agar dialokasikan untuk Operasional Pemerintah Kalurahan Maksimal sebesar Rp. 53.861.290,-
2. Kegiatan Muskal RKP Kal untuk sumber dana semula dari PAD agar diubah dari Dana Desa karena melibatkan banyak lembaga dan tokoh masyarakat.
3. Kegiatan penyediaan insentif/opersaional RT untuk honor panitia agar dihapus..
4. Kegiatan pengisian Bamuskal untuk RAB agar diperinci.
5. Kegiatan penyuluhan dan penyadaran gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan untuk honor narasumber agar disesuaikan SHBJ dan honor panitia agar dihapus.

6. Kegiatan RTLH yang bersumber dari Dana Desa yang semula sebesar Rp. 15.000.000,- agar disesuaikan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- dan tidak ada upah tenaga kerja.
  7. Kegiatan pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kalurahan agar digeser ke kegiatan penanganan keadaan darurat.
  8. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan sebaiknya ada juga kegiatan tindak lanjut paska pelatihan.
  9. Untuk kegiatan TP PKK tentang usaha ekonomi produktif sebaiknya diberi biaya pengembangan dan permodalannya serta anggaran pendampingan.
  10. Pendataan kemiskinan menjadi salah satu kegiatan prioritas Dana Desa 2023.
- D. Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 subsidi materi pasal ayat pada prinsipnya sudah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- E. NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN  
Nomor Register Peraturan Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul dalam surat tersendiri kemudian hari.



EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos. MM  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197201021998032009

## KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Jum'at tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HENRI KRISMAWAN, SP., MM  
Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Wonokromo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Kalurahan Wonokromo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : H. AM MACHRUS HANAFI, S.Ag  
Jabatan : Lurah Wonokromo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Wonokromo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



H. AM MACHRUS HANAFI, S.Ag



HENRI KRISMAWAN, SP. MM



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PLERET  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO**  
*ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦱꦶꦮꦮꦫꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦮꦺꦤꦺꦴꦏꦿꦺꦴꦩꦺ*  
Alamat : Ketonggo, Wonokromo, Pleret, Bantul Telp .(0274) 4415258. Kode Pos 55791  
e-mail: bpdwonokromo@gmail.com

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO**  
**KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO**

NOMOR : 16 TAHUN 2022

TENTANG  
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO,

Menimbang:

- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Wonokromo Peraturan Kalurahan tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Kalurahan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 620 Tahun 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2018-2024 menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2018-2024 menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Periode 2018-2024);
11. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Tahun 2021-2026;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN KALURAHAN

**KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

**KEDUA** : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonokromo

Pada Tanggal : 16 Desember 2022

KEYUA BAKUSKAL WONOKROMO



**HENRI KRISMAWAN, SP, MM**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Panewu Pleret;
5. Untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;